



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* menggambarkan bahwa ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat di capai dengan cara *maksimalisasi utilitas principals* dan menejemen. Teori *Stewardship* dapat di terapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan non *prosif* lain nya (Khairan *et al.*, 2024).

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah antara lain, dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevancy*), andal (*reliability*) dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila pemerintah mampu menerapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas seperti disyaratkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual yang merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Sari *et al.*, 2024)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.2 Teori dan Standar Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Menurut (Santoso & Pambelum, 2008) teori memiliki tiga karakteristik dasar yaitu :

- 1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*),
- 2) Kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*),
- 3) Kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Pada dasarnya terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu:

- 1) Untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini,
- 2) Mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan
- 3) Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.

Pengembangan teori sektor publik untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (reliable). Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi



sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistic (Santoso & Pambelum, 2008).

Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah benar ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Siska Septiani *et al.*, 2022). Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Saat ini di Indonesia telah memasuki era baru pengembangan akuntansi pemerintah yaitu penggunaan basis akrual dalam akuntansi nya Indikator akuntansi sektor publik adalah : andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Khairan *et al.*, 2024)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.4 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran (Siska Septiani et al., 2022).

2.1.5 Jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akuntansi pemerintah dan akuntansi sosial (Gurendrawati *et al.*, 2024).

1) Akuntansi Pemerintah

Akuntansi publik atau akuntansi pemerintah adalah suatu data akuntansi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah yang dilaporkan kepada lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan dibedakan menjadi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, akuntansi pemerintah daerah ditujukan kepada akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/ kota.

2) Akuntansi Sosial

Berbeda dengan akuntan publik, akuntansi sosial merupakan cabang akuntansi khusus untuk organisasi, seperti organisasi makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial berguna dalam mencatat aktivitas



ekonomi organisasi nonlaba yang mencakup pusat kesehatan, masjid, partai politik, rumah sakit, dan lain-lain.

2.1.6 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik serta pelaporan keuangan akuntansi sektor publik dapat dipengaruhi oleh kegiatan operasional organisasi, khususnya dalam pemerintahan. Untuk menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporannya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut (Gurendrawati et al., 2024).

a) Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang Diberikan

- 1) Suatu bentuk umum dari pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Desentralisasi adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk memantau dan menjaga keseimbangan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pengelola pemerintahan.
- 2) Dalam sistem pemerintahan sendiri. Pada dasarnya, terdapat tiga bidang pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintahan yang lebih luas memberikan arahan kepada pemerintahan yang lebih sempit.
- 3) Pengaruh proses politik. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berupaya mencapai keseimbangan fiskal dengan menjaga kemampuan keuangan daerah dari penerimaan pajak dan sumber lain untuk memenuhi keinginan masyarakat.
- 4) Hubungan pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah. Walaupun dalam beberapa kasus pemerintah daerah memungut langsung biaya pelayanan yang diberikan, sebagian besar pendapatan pemerintah daerah berasal dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

pemungutan pajak yang merupakan bagian dari pemberian biaya pelayanan masyarakat.

b) Keuangan Pemerintah Daerah yang Penting untuk Diawasi

- 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, tujuan keuangan, dan alat pengendalian. Anggaran pemerintah daerah adalah dokumen formal yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Anggaran pemerintah daerah digunakan sebagai penentu langkah-langkah yang berkaitan dengan ketetapan pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan harapan pendapatan.
- 2) Berinvestasi pada aset-aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan. Pemerintah daerah menginvestasikan uang dalam jumlah besar pada aset-aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan cagar alam.
- 3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Akuntansi dana adalah suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang umum diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.

2.1.7 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik dan Perkembangannya

Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya. Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang



nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Sementara itu, organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan (Gurendrawati *et al.*, 2024)

2.1.8 Kualitas Aparatur Pemerintah

2.1.9 Teori Dan Definisi Kualitas Aparatur Pemerintah

Pengertian kualitas adalah Kesesuaian dengan standar diukur dengan menghitung tingkat ketidaksesuaian dan pemeriksaan. Pengertian aparatur pemerintah adalah Pekerja yang digaji pemerintah melakukan tugas teknis pemerintah dan melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian aparatur pemerintah daerah adalah semua perangkat daerah yang menangani urusan rumah tangga dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbantukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas dan fungsi utamanya secara menyeluruh adalah yang dimaksud dengan kualitas aparatur daerah. Kompetensi ASN di bidang akuntansi (keuangan) memungkinkan ASN yang profesional untuk memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, sehingga laporan tersebut dapat memenuhi kualifikasi informasi yang bermanfaat (Nada, 2024).

Indikator untuk menilai kompetensi aparatur menurut (Nada, 2024) yaitu:

- a. Pengetahuan: kesadaran dalam domain kognitif. Seorang karyawan, misalnya mengetahui cara mengidentifikasi belajar dan melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.



- b. Pemahaman ke dalam kapasitas kognitif dan afektif seseorang. Seorang karyawan, misalnya, harus memahami karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien untuk melakukan pembelajaran.
- c. Kemampuan: Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat menyelesaikan tugas atau tugas yang diberikan kepadanya.
- d. Nilai: suatu norma perilaku yang diyakini dan ditanamkan dalam pikiran seseorang. Sikap (Attitude). Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- e. Kecenderungan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti melakukan tugas.

2.1.10 Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan.

Kecurangan ataupun *fraud* ialah sesuatu perbuatan melawan hukum yang dicoba oleh orang-orang dari dalam ataupun luar organisasi, dengan iktikad buat memperoleh keuntungan orang ataupun kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Dalam lingkup akuntansi *fraud* ialah penyimpangan dari prosedur akuntansi yang sepatutnya diterapkan dalam suatu entitas. Kecurangan ataupun *fraud* dicoba secara terencana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan dalam sesuatu industri dapat dicoba oleh segala pihak yang turut dan dalam industri tersebut. Tidak hanya pemegang kekuasaan namun para pegawai lapisan bawah dapat pula melakukan suatu aksi kecurangan (Mashitoh et al., 2024).

Secara umum, kecurangan (*fraud*) dapat dibagi menjadi tiga kategori: penyelewengan aset, pemalsuan laporan keuangan, dan korupsi. Teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, menyatakan bahwa ada tiga penyebab dasar penipuan: faktor tekanan, faktor peluang, dan pertimbangan



rasionalisasi. Selain Teori *Fraud Triangle*, ada juga teori *Fraud Diamond* yang memperluas *Fraud Triangle* dengan menambahkan aspek kausal kedua yang disebut kapabilitas. Prinsip sentral teori ini adalah bahwa dua kelompok kekuatan, yaitu elemen internal dalam bentuk kapabilitas dan rasionalisasi dan faktor eksternal dalam bentuk tekanan dan kesempatan dapat menimbulkan kecurangan (*fraud*). *Fraud* dapat dipecah menjadi tiga kategori perilaku, yaitu (Fauziyah & Setyawan, 2023).

- 1) Penyalahgunaan aset, adalah jenis *fraud* yang paling sederhana untuk diidentifikasi karena melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset sehingga kerusakan yang ditimbulkan akibat *fraud* dapat diukur atau diperkirakan.
- 2) Pernyataan palsu, ketika rekayasa keuangan digunakan untuk menggambarkan laporan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan situasi keuangannya yang sebenarnya
- 3) Korupsi merupakan salah satu jenis *fraud* yang sulit dideteksi karena dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain dalam jaringan yang terorganisir dan metodis. *Fraud* jenis ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah, sehingga banyak pihak yang masih belum menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang solid. *Fraud* dapat berkembang sebagai akibat dari tiga penyebab utama, menurut teori *fraud triangle* Donald R. Cressey: tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Fauziyah & Setyawan, 2023).

a) Tekanan (*Pressure*)

Seseorang dapat melakukan *fraud* karena tekanan dari faktor luar (eksternal). Tekanan ini bisa berasal dari beberapa hal, seperti tekanan dari



tempat kerja, tekanan keuangan, tekanan dari perilaku yang tidak sehat, dan tekanan lainnya.

b) Kesempatan (*Opportunity*)

Faktor eksternal yang disebut peluang dapat menginspirasi atau mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*. Faktor ini biasanya masuk persamaan ketika ada sistem kontrol yang tergolong lemah, seperti kurangnya pemantauan atau audit yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

c) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Komponen ketiga ini adalah hasil dari keyakinan internal individu bahwa perilaku *fraud* itu rasional dan dapat diterima secara moral.

2.1.11 Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* dikemukakan oleh Wolfe and Hermanson (2004) dengan menambahkan tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan akuntansi yang ditemukan Cressey (1953) yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dengan faktor kemampuan (*capability*). Terdapat tiga faktor yang mendorong terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu:

1. Tekanan (*pressure*) yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan yang mencakup gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan hal-hal lainnya baik bersifat keuangan dan non keuangan yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tekanan dalam organisasi muncul karena kebutuhan yang tidak tercukupi dari kompensasi yang diberikan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Kesempatan (*opportunity*) yakni situasi yang memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan. Kesempatan terjadinya kecurangan dalam organisasi dikarenakan lemahnya pengendalian internal sebagai pendeteksi kecurangan. Meningkatnya kesempatan dalam kecurangan dikarenakan kegagalan organisasi dalam menetapkan prosedur dan kontrol yang memadai untuk mendeteksi adanya aktivitas kecurangan.
3. Rasionalisasi (*rationalization*) yaitu sikap, karakter, nilai-nilai etis yang memperbolehkan individu-individu tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Rasionalisasi juga disebut dengan pembenaran atas tindakan yang mengandung kecurangan. pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan pegawai karena ketidakpuasan atas kompensasi yang diperoleh.

Wolfe and Hermanson (2004) mengungkapkan bahwa kasus kecurangan tidak akan terjadi tanpa dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut. Sifat-sifat yang berkaitan dengan faktor kemampuan (*capability*) adalah sebagai berikut:

a. *Positioning*

Seseorang yang memiliki jabatan atau posisi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk memanfaatkan peluang untuk melakukan kecurangan.

b. *Brains*

Seseorang yang memiliki kemampuan dan pemahaman untuk mengambil keuntungan dari kelemahan pengendalian internal dan menggunakan posisi, jabatan atau otoritas untuk memaksimalkan keuntungan.



c. *Confidence / Ego*

Seseorang yang melakukan kecurangan harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan agar tindakannya tidak dapat dideteksi.

d. *Coercion Skill*

Seseorang yang melakukan kecurangan memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain agar menyembunyikan tindakan kecurangan yang telah dilakukan.

e. *Effective lying*,

Seseorang yang berhasil melakukan kecurangan membutuhkan kebohongan yang efektif dan merekayasa fakta agar tidak mudah dideteksi.

f. *Immunity to stress*

Seseorang yang melakukan kecurangan harus mampu mengendalikan stress dan menyembunyikan tindakannya agar tidak menimbulkan stress.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
1	Fangela Myas Sari , Anni Safitri , Aria Elshifa	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan). Journal of Social and Policy Issues E-ISSN: 2807-3843 I P-ISSN:	Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Aparatur Pemerintah Pencegahan <i>Fraud</i> Laporan Keuangan	Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil ini dapat diinterpretasi kan bahwa semakin tingginya tingkat penerapan SAP dan baiknya Penerapan SAP maka dapat mencegah terjadinya a pencegahan <i>Fraud</i> laporan keuangan hal ini dikarenakan suatu penerapan SAP yang mengikuti aturan dari maka akan mempengaruhi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang/Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
		2829-8632 https://doi.org/10.58835/jspi.v4i2.331		pencegahan <i>fraud</i> . Dan untuk variabel kualitas aparatur pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap <i>Fraud Triangel</i> . Ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah di kota Pekalongan untuk posisi dan jabatannya sudah diterapkan dengan baik untuk mencegah <i>Fraud</i> . Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, hasilnya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Saran-saran ini termasuk penelitian menggunakan metode lain seperti wawancara, memperluas objek penelitian, dan menambahkan variabel seperti variabel profesional kerja, SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang mungkin mempengaruhi <i>Fraud Triangel</i> .



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
2	Ulfiatul Khairan Ikhyannuddin Murhaban. Rayyan Firdaus	Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara). JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALAH https://ojs.unim.al.ac.id/jam DOI :10.29103/jam.v%vi%i.10689 <i>JAM</i> , Volume 2, No 3, September 2023 ISSN : 2962-6927 https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10689	Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X1 akuntansi sektor publik memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan fraud pada daerah kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara), maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntansi sektor publik berdampak signifikan terhadap pencegahan fraud di pemerintahan aceh utara dan Secara parsial akuntabilitas kinerja instansi berdampak positif terhadap pencegahan fraud di instansi pemerintahan Aceh Utara.
3	Indri Yunistasia Tamambali,	Pengaruh efektivitas sistem	Efektivitas sistem pengendalian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
	Margaretha E.J Wagev, Abdul Rahman Taher	pengendalian intern Pemerintah dan kompetensi aparatur desa Terhadap pencegahan <i>fraud</i> (studi pada desa sedoa kecamatan lore utara). https://jurnalazislamadjido.ac.id/index.php/JERAM/article/view/182	intern Pemerintah, kompetensi aparatur desa, pencegahan <i>fraud</i>	bahwa 1) efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$; 2) efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara dengan nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$; 3) kompetensi aparatur desa secara parsial dan signifikan terhadap pencegahan fraud di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara dengan nilai signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$.
4	Azalia kitasha asril, taufeni taufik, sem paulus silalahi	Pengaruh penerapan sistem pengendalian Internal, kompetensi aparatur, dan moralitas	penerapan sistem pengendalian Internal, kompetensi aparatur, dan moralitas pencegahan	Hasil analisis data memanfaatkan SPSS 29 menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengendalian internal memiliki



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
		terhadap pencegahan <i>fraud</i> (studi empiris pada desa di kecamatan siulak kabupaten kerinci). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha Vol : 15 No:04:2024 https://doi.org/10.23887/jimat.v15i04.78903	<i>fraud</i>	pengaruh akan pencegahan <i>fraud</i> . Kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh akan pencegahan <i>fraud</i> . Moralitas memiliki pengaruh akan pencegahan <i>fraud</i> .
5	Lathifah Nur'aini, Salza Adzri Arismutia	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, <i>Whistleblowing System</i> , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung). P-issn 2622-4291 E-issn 2622-4305 volume 6, nomor 3, april 2024 Eco-buss Jejak artikel:	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, <i>Whistleblowing System</i> , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pencegahan <i>Fraud</i>	Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah Inspektorat Daerah Kota Bandung, Tindakan kepemimpinan dapat meningkatkan pencegahan kecurangan karena Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki dampak yang besar. Karena manfaat besar dari pelaporan pelanggaran, sistem pelaporan yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
		Unggah: 17 maret 2024; Revisi: 22 maret 2024; Diterima: 27 maret 2024; Tersedia online: 10 april 2024 https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1200		lebih kuat dapat membantu mencegah kecurangan. Karena kompetensi SDM tidak signifikan secara statistik, kompetensi SDM tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan. Kata kunci: kompetensi SDM, pengendalian intern pemerintah, dan sistem <i>whistleblowing system</i> bekerja sama untuk mencegah kecurangan. Kecurangan dapat dicegah sebesar 74% oleh pengendalian internal pemerintah, 26% oleh variabel eksternal, dan 74% oleh sistem pelaporan pelanggaran dan kompetensi sumber daya manusia

2.3 Kerangka Pemikiran

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja instansi



pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran (Siska Septiani *et al.*, 2022). Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolok kinerja yang telah Tolok ukur kinerja yang ditetapkan tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Salah satu tolok ukur kinerja non keuangan yang perlu menjadi perhatian adalah kinerja sumber daya manusia (Hidayat *et al.*, 2021).

Pencegahan kecurangan sebagai penggunaan control pencegahan, seperti aturan, proses, pelatihan, dan komunikasi, untuk mencegah terjadinya kecurangan. Meskipun mungkin tidak memberikan jaminan 100% terhadap kecurangan, tindakan pencegahan merupakan garis pertahanan pertama yang penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (Nur'aini & Arismutia, 2024). Kecurangan ataupun fraud ialah sesuatu perbuatan melawan hukum yang dicoba oleh orang-orang dari dalam ataupun luar organisasi, dengan iktikad buat memperoleh keuntungan orang ataupun kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Mashitoh *et al.*, 2024).

Penerapan akuntansi sektor publik memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem akuntansi yang baik membantu pemerintah daerah dalam menyajikan informasi



keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan standar akuntansi sektor publik (SAP) yang tepat, laporan keuangan daerah dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga meminimalkan peluang terjadinya kecurangan atau fraud. Semakin baik penerapan akuntansi sektor publik, semakin kecil kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.

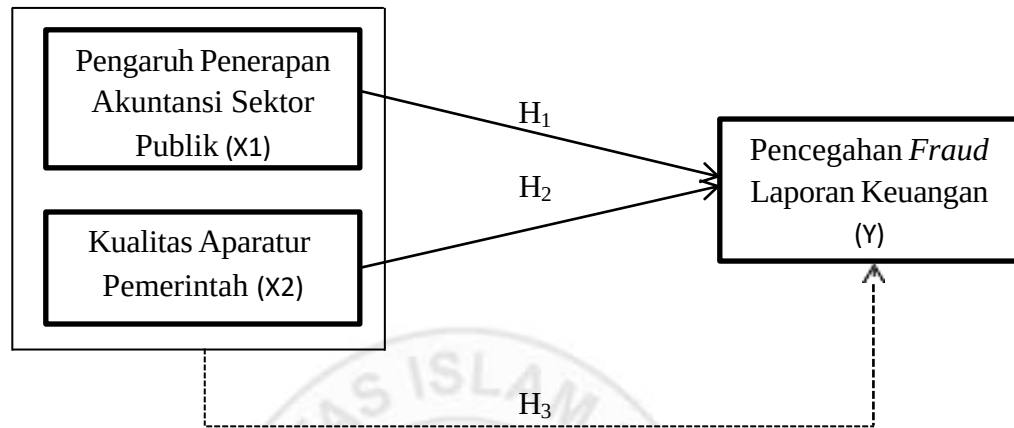
Selain itu, kualitas aparatur pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya fraud pada laporan keuangan. Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi akan lebih mampu menjalankan tugas sesuai peraturan dan etika profesi. Aparatur dengan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi akan cenderung bersikap jujur dan profesional dalam mengelola anggaran publik. Sebaliknya, rendahnya kualitas aparatur dapat membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan, baik karena ketidaktahuan maupun karena adanya niat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik akan menjadi instrumen pengendalian internal yang efektif, sementara kualitas aparatur pemerintah menjadi pelaku utama dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Kombinasi antara sistem akuntansi yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas akan memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin baik penerapan akuntansi sektor publik dan semakin tinggi kualitas aparatur pemerintah, maka upaya pencegahan fraud



laporan keuangan di pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, akan semakin efektif.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- > Parsial
-----> Simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat takterduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan telaah teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangnn pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.
- H₂ : kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.
- H₃ : penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangnn pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.